

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM IKUT MENGATASI PENGANGGURAN TERDIDIK

Mudzakir

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 'YPPI' Rembang
Email: mudzakirmz@yahoo.com

Abstract

Unemployment (including unemployment educated) give a negative impact to the community and economy of the State. So that negative impacts do not occur, then the necessary action to resolve them. Many government policies have been published and one of them is the implementation of Concept Based Curriculum in college. Institutions of higher education as an operator in the implementation of Competency Based Curriculum. But it is still a bit that has done it. Among those who turned out to be not implemented fully. A limited resource constraints. So the government gives grants based Curriculum Competition began in 2013. If the Competency-Based Curriculum concept can be implemented in full and by all higher education institutions in Indonesia, the increase in the number of educated unemployed can be resolved. Therefore, implementation of the concept of curriculum-based curriculum in higher education institutions is a form of concrete role of higher education in addressing the increasing number of educated unemployment is very important.

Keywords: Unemployment, Competency-Based Curriculum, Higher Education

PENDAHULUAN

Data BPS pada Februari 2013 di Indonesia terdapat 7,17 juta pengangguran terbuka atau 5,92 % dari jumlah angkatan kerja sebesar 121,2 juta orang, di antaranya terdapat 610.000 orang kategori pengangguran terdidik lulusan diploma 190.000 orang atau 2,69% dan lulusan sarjana 420.000 orang atau 5,88% (BPS, Februari 2013). Jumlah pengangguran Indonesia di antara Negara-negara tetangga adalah tertinggi, yaitu 7,9 %. Sedangkan Negara-negara tetangga : Thailand 1,2 %, Malaysia 3,7 %, Singapura 5,9 %, dan Filipina 7,5 % (World Bank, 2009). Sehingga Presiden Indonesia dalam pidato di depan Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2012 menargetkan penurunan jumlah pengangguran di tahun 2013 mendatang adalah menjadi 5,8% - 6,1% (Republika, 2012). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana masih

tinggi, yaitu masing-masing 7,5% dan 6,95% (BPS, Februari 2012).

Pengangguran memberikan dampak negatif bagi perekonomian Negara, yaitu penyebab terjadinya: (1) penurunan pendapatan per kapita, (2) penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak, (3) meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan dampak negatif pengangguran bagi masyarakat adalah : (1) pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis, (2) pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, karena tidak digunakan apabila tidak bekerja, dan (3) pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik (Wikipedia, 2012). Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), bahwa pola pengangguran di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia lebih banyak ditemukan di kalangan mereka yang mengenyam pendidikan tinggi (Sanisah, 2010). Karena itu untuk mengatasi pengangguran berikut dampaknya

tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab dan komitmen seluruh komponen masyarakat termasuk institusi pendidikan tinggi.

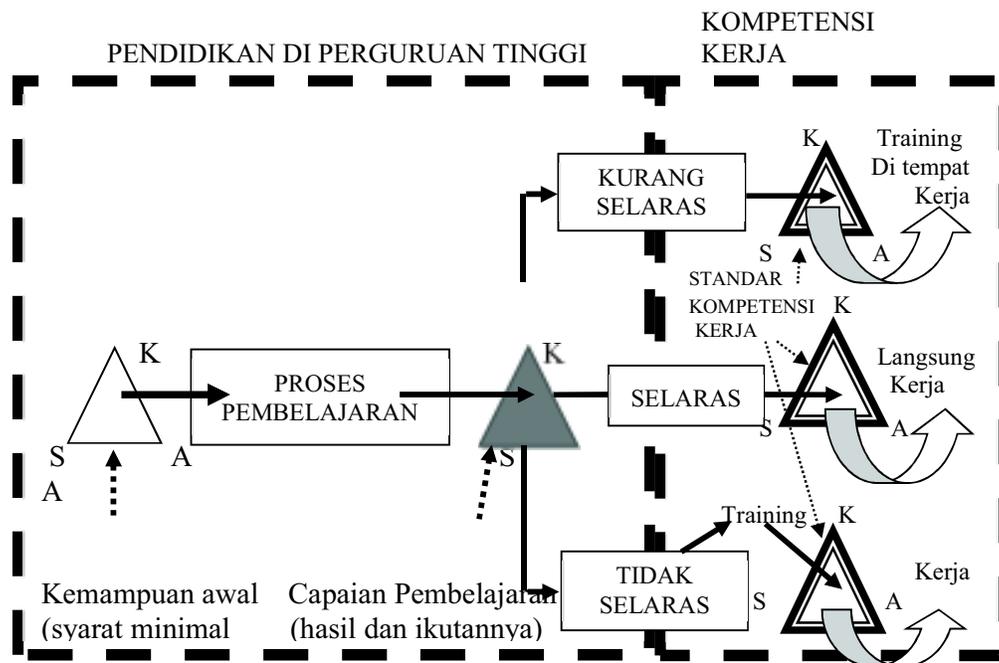
KOMPETENSI LULUSAN

Kurikulum yang disusun dalam satu satuan pendidikan (program studi) didasarkan kepada penetapan kompetensi lulusan yang akan dibangun. Kompetensi lulusan berpangkal kepada Visi – Misi – Tujuan Strategik program studi yang memiliki landasan psikologis dan landasan filsafat. Perkembangan iptek, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan mahasiswa menjadi dasar penetapan Visi – Misi – Tujuan Strategik program studi (Gufron, 2010).

Agar lulusan mampu memasuki dunia kerja, maka kompetensi lulusan atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) harus selaras dengan Standar Kompetensi Kerja (kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja). Namun kenyataan, bahwa lulusan tidak semuanya memiliki Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang selaras dengan Standar Kompetensi Kerja. Apabila hal ini tidak disadari, maka lulusan berpotensi menjadi pengangguran terdidik,

Untuk meminimalisasi terjadinya peningkatan jumlah pengangguran terdidik, maka diperlukan tindakan sesuai keadaan lulusan. Ada tiga keadaan tentang hubungan kompetensi lulusan perguruan tinggi hubungannya dengan standar kompetensi kerja yang disajikan pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1.
Hubungan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Tinggi dengan Standar Kompetensi di Dunia Kerja



Sumber: Sailah (2012:25), diolah.

Dari Gambar 1. di depan menunjukkan, bahwa lulusan yang memiliki kompetensi (SKL)

selaras atau sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK), maka lulusan telah siap

memasuki dunia kerja. Apabila kurang selaras (kekurangan dapat diberikan toleransi oleh penerima kerja), maka dapat diterima kerja dan diperlukan pelatihan di tempat kerja guna memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Namun apabila lulusan tidak selaras, maka diperlukan pelatihan terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan diri sesuai tuntutan dunia kerja, baru kemudian mengikuti proses rekrutmen.

KURIKULUM PROGRAM STUDI

Banyak kebijakan yang telah dilaksanakan Pemerintah untuk mengatasi meningkatnya tingkat pengangguran terdidik, salah satu di antaranya diterbitkan Konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2005 dan penyempurnaan implementasi KBK pada tahun 2008. Konsep tersebut di dorong timbulnya perubahan besar atas pandangan kehidupan masyarakat (dari lokal ke global), dari kohesi sosial ke partisipasi demokratis, dan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan. Untuk mengatasi perubahan tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi dipakai landasan: (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to live together*, dan (4) *learning to be* (UNESCO,1998). Sosialisasi dan *workshop* telah dilaksanakan sejak tahun 2005, namun hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan baru 20% yang merespon (Ibrahim, 2012). Perubahan dari kurikulum lama ke KBK sangat berat bagi institusi pendidikan tinggi, sehingga belum banyak perguruan tinggi melaksanakannya secara penuh. Karena itu diperlukan kebijakan pendukung, yaitu pemberian hibah KBK untuk program studi (melalui persyaratan tertentu) yang direalisasikan mulai tahun 2013.

Program Studi merupakan unit pelaksana teknis untuk aktivitas pembelajaran di institusi pendidikan tinggi. Ketua Program Studi

(Kaprodi) adalah personal yang memiliki kewenangan dalam manajemen kurikulum. Keterbatasan sumberdaya menjadi salah satu sebab Kaprodi tidak melaksanakan manajemen kurikulum dengan baik dan belum melaksanakan konsep KBK. Umumnya pelaksanaan manajemen kurikulum terbatas hanya penyelenggaraan rutin pembelajaran (Dosen, jadwal kuliah, presensi kuliah, prasarana, dan sarana pembelajaran). Tidak banyak yang mampu melaksanakan manajemen kurikulum secara penuh dengan empat fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian). Ironinya, Kaprodi tidak tahu dan/atau tidak mampu menjelaskan posisi satu mata kuliah dengan mata kuliah lain dalam pembentukan kompetensi lulusan. Sehingga Dosen pengampu mata kuliah sebatas sebagai mesin penyampai materi tanpa memberikan penjelasan sebelumnya tentang posisi mata kuliah dalam pembentukan kompetensi diri mahasiswa nantinya.

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK)

Konsep KBK merupakan konsep perubahan kurikulum pendidikan tinggi yang mengacu kepada pendidikan tinggi Abad XXI Unesco. Perubahan kurikulum lama ke kurikulum baru (KBK) dituangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002. Perubahan kurikulum tersebut juga berarti perubahan pembelajarannya. Pemberlakuan Konsep KBK dipertegas oleh Peraturan Pemerintah N0. 17/2010 pasal 97, bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Dalam konsep KBK tidak sekedar proses *transfer of knowledge*, tetapi benar-benar merupakan proses pembekalan agar seseorang berkompeten dalam berkarya di masyarakat (*method of inquiry*). Sehingga

lulusan pendidikan tinggi diharapkan sesuai dengan *societal needs, industrial/business, dan needs, profesional needs. Outcomes* (luaran hasil pendidikan) nantinya memiliki kemampuan mengintegrasikan *intellectual skill, knowledge*, dan afektif dalam perilaku secara utuh (Subdit KPS, 2008:10).

Memahami Konsep KBK, maka pembelajaran menekankan pada keseimbangan kemampuan hard skill dan soft skill, penilaian lulusan dilakukan tidak hanya oleh pihak produsen (perguruan tinggi, program studi) tetapi juga oleh pengguna (*stakeholder*), dan lulusan memiliki kemampuan yang dibutuhkan masyarakat pengguna. Sehingga diharapkan lulusan memiliki kemampuan memasuki dunia kerja, baik sebagai *job seeker* (bekerja ikut pihak lain) maupun sebagai *job creator* (mampu menciptakan pekerjaan sendiri). Dengan demikian lulusan pendidikan tinggi tidak menjadi pengangguran terdidik. Dalam kaitan dengan upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan pendidikan tinggi di Indonesia, maka Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dipakai sebagai acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional (Ibrahim, 2012).

SIMPULAN

Pengangguran (termasuk pengangguran terdidik) memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan perekonomian Negara. Pengangguran di Indonesia menduduki posisi tertinggi dibanding Negara-negara tetangga, sehingga Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya. Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bertekad untuk menurunkan dari 7,9% tahun 2009 menjadi 5,8% - 6,1% pada tahun 2013. Karena itu berbagai kebijakan Pemerintah diterbitkan untuk mencapai target tersebut.

Pengangguran terdidik adalah produk dari pendidikan tinggi. Untuk mengatasi

pengangguran terdidik tersebut tidak hanya diharapkan dari Pemerintah, tetapi juga dari institusi pendidikan tinggi. Konsep KBK merupakan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi meningkatnya tingkat pengangguran terdidik tiap tahun. Dengan Konsep KBK, diharapkan lulusan pendidikan tinggi memiliki kemampuan memasuki dunia kerja, baik sebagai *job seeker* (bekerja ikut pihak lain) maupun sebagai *job creator* (mampu menciptakan pekerjaan sendiri). Sebagai operator Konsep KBK adalah institusi pendidikan tinggi, maka pelaksanaan Konsep KBK tergantung institusi pendidikan tinggi. Akhirnya peran aktif pendidikan tinggi untuk ikut mengatasi tingkat pengangguran terdidik di Indonesia menjadi penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Gufron, Anik. 2010. *Kompetensi*. Makalah. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/16/m8uu93-pemerintah-prioritaskan-empat-isu-strategis-di-2013>.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/pengangguran>.
- <http://gusschool.wordpress.com/2011/08/10/tingkat-pengangguran-unemployment-negara-di-dunia-menurut-world-bank>.
- Ibrahim, Wahyu. 2012. *Panduan Penyusunan Proposal Hibah Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Program Studi Tahun 2013*. <http://www.dikti.go.id>. 25-07-2012.
- Sanisah, Siti. 2010. *Pendidikan Tinggi dan Pengangguran Terbuka: Sebuah Dilemma*. Lentera Pendidikan, Vol 13 No. 2 Desember 2010. <http://www.uin-alauddin.ac.id/download-03> Pendidikan Tinggi - Siti Sanisah.
- Subdit KPS, Dit. Akademik Ditjen Dikti Depdiknas. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi – Sebuah Alternatif Penyusunan Kurikulum*. Jakarta.
- UNESCO.1998.*Higher Education in the Twenty-first Century: Vision and Action*. World Conference on Higher Education. Paris: 5-9 Oktober 1998.